



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

# Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2023

## SEKRETARIAT DAERAH



Jalan A. Yani No. 01 Telp. (0526) 2028395 Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan  
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662

## Daftar isi

Daftar Isi		1
Kata Pengantar		2
Ringkasan Eksekutif		3
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Tujuan	6
	1.4 Gambaran Umum SKPD	6
Bab II	Perencanaan Kinerja	
	2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021	9
	2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	9
	2.1.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat	12
	2.1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	13
	2.2 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026	
	2.2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	13
	2.2.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat	21
	2.2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	21
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	3.1 Akuntabilitas Kinerja Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021	22
	3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	22
	3.1.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	51
	3.2 Akuntabilitas Kinerja Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026	70
	3.2.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	71
	3.2.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	85
	3.2.3 Analisis Kinerja lainnya Sekretariat Daerah	103
	A Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Sekretariat Daerah tahun 2021	103
	B Program Penanganan Covid-19 Sekretariat Daerah tahun 2021	106
	C Penghargaan-penghargaan yang didapat Sekretariat Daerah	107
	D Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah	107
Bab IV	Penutup	109

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Paringin, Januari 2023,

**Sekretaris Daerah,**



**H. SUTIKNO, AP., M.AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760417 199412 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022.

Kabupaten Balangan menyusun RPJMD baru pada tahun 2021, yang disahkan di bulan September 2021, sehingga seluruh SKPD telah menggunakan tujuan, sasaran dan indikator baru sejak bulan September 2021. Dampak dari hal tersebut Sekretariat Daerah pada LAKIP ini akan menyampaikan capaian Renstra 2016-2021 dan capaian Renstra 2021-2026

Berdasarkan Renstra 2016-2021 Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator. Dan berdasarkan Renstra 2021-2026 melaksanakan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator.

Pencapaian Target Sasaran berdasarkan Renstra 2016-2021, pada tahun 2021 merupakan pencapaian target akhir atau bisa dikatakan sebagai laporan akhir masa jabatan. Dari 6 indikator terdapat 1 (satu indikator yang mana sampai laporan ini disusun data belum tersedia yaitu nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan 5 (lima) indikator lainnya telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Pencapaian Target Sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dilaporkan untuk pencapai tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan sejak bulan September sampai dengan Desember 2021, namun terbatasnya waktu pelaksanaan ini tidak menjadi penghambat tercapaian target indikator sasaran. Terdapat 1 Sasaran dengan 4 Indikator Sasaran dengan capaian berhasil.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat Daerah, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah adanya keinginan yang kuat dari Sekretariat Daerah untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

#### **“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Dengan pelaksanaan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Belum optimalnya tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
3. Belum optimalnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. *UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### 1.3 Tujuan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi**. Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampuan Sekretariat daerah pada misi ke-5 RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara**. Adapun indikator Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kabupaten
2. Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi
3. Nilai Budaya Kerja Kabupaten
4. Nilai IKM Kabupaten
5. Nilai SAKIP SETDA

### 1.4 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

tabel 1.1  
Unsur Organisasi pada Sekretariat Daerah berdasarkan  
Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021

NO.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah	
1	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	
	1	Bagian Pemerintahan
		Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
		Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
		Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah
	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
		Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
		Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
	3	Bagian Hukum
		Sub Bagian Perundang-Undangan;
		Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
		Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
	<b>2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	
	a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
		Sub Bagian Perekonomian; dan
		Sub Bagian Sumber Daya Alam
	b.	Bagian Administrasi Pembangunan
		Sub Bagian Penyusunan Program;
		Sub Bagian Pengendalian Program; dan



		Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	c.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
		Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
		Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
<b>3</b>		<b>Asisten Administrasi Umum</b>
	a.	Bagian Umum
		Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
		Sub Bagian Keuangan; dan
		Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
	b.	Bagian Organisasi
		Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
		Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
		Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
	c.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Sub Bagian Protokol;
		Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
		Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
<b>4</b>		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>

Struktur Organisasi

## BAB I

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2021 – 2026 serta menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 januari sampai dengan Agustus 2023 dan Perjanjian Kinerja September sampai dengan Desember 2023.

#### 2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

##### 2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan terpilih periode 2021-2024 menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Balangan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sejak di tetapkannya Renstra 2021-2026 pada bulan September 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dan diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Balangan Bupati dan Wakil Kepala Bupati Terpilih. Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini juga diperkuat dengan perubahan Nomenklatur yang di dalam Perda Nomor 2 tahun 2021. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 Setda mengampu pada Misi ke 4 yaitu **Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.**

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi.** Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampuan Sekretariat daerah pada misi ke-5 RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.** Adapun indikator Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kabupaten
2. Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi
3. Nilai Budaya Kerja Kabupaten
4. Nilai IKM Kabupaten
5. Nilai SAKIP SETDA

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah memfokuskan pada peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan publik secara Prima. Hal tersebut menjadi tujuan dari Sekretariat Daerah untuk dapat dicapai secara optimal dalam perencanaan 5 (lima) tahunan Sekretariat Daerah

**Tabel 2.2.1 (1)**

**Tujuan Sekretariat Daerah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021**

Tujuan Sekretariat Daerah	Indikator Tujuan Setda	Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	B = 68.4	BB =70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2
	Persentase SKPD dengan Capaian IKK Tinggi			100%	100%	100%	100%
	Nilai Budaya Kerja Kabupaten			79,51	79,51	79,51	79,51
	Nilai IKM Kabupaten	82,55	83.0,60	83,70	84,00	84,50	85,00
	Nilai SAKIP SETDA			72.4	74.4	76.4	78.2

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel**. Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampunan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.2.1 (2)

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**Visi** : **Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera**  
**Misi k-4 RPJMD** : **Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1	Nilai SAKIP Kabupaten	B = 68.4	BB =70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB =78.2	Bagian Organisasi
			2	Persentase SKPD dengan Capaian IKK Tinggi			100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
		Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	3	Nilai Budaya Kerja Kabupaten			79,51	79,51	79,51	79,51	Bagian Organisasi
			4	Nilai IKM Kabupaten	82,55	83,60	83,70	84,00	84,50	85,00	Bagian Organisasi
			5	Nilai SAKIP SETDA			72.4	74.4	76.4	78.2	Bagian Organisasi

## **Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Adapun indikator Sasaran RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. nilai LPPD;
2. Nilai LAKIP;
3. Indeks Pelayanan Publik; dan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat, pada tabel 2.2.4 dibawah ini.

Tabel 2.2.1 (3)

## INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
				tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Kabupaten	B = 66.04	B = 68.4	BB = 70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2	BB = 78.2	<b>Makna :</b> Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi [rencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja	Bagian Organisasi	Bappedalitbang Inspektorat Bagian Organisasi dan seluruh SKPD

										<p><b>Alasan Pemilihan :</b>          Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah syang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p>					
										<p><b>Perhitungan atau penjelasan : LHE SAKIP kementerian RB</b></p>					
											<p><b>Makna :</b> IKK kabupaten/kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian</p>	Bagian Organisasi	Seluruh SKPD		
											<p>Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi</p>				
											100%	100%	100%	100%	100%

										<p><b>Alasan Pemilihan :</b>          Dengan nilai IKK Pemerintah Kabupaten Balangan yang semakin meningkat maka dapat diukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pada level pemerintah daerah sampai pada SKPD</p>			
										<p><b>Perhitungan atau penjelasan :</b> Hasil SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi</p>			
		<p>Nilai Budaya Kerja Kabupaten</p>				79,51	79,51	79,51 )	79,51	79,51	<p><b>Makna :</b></p>	<p>Bagian Organisasi</p>	<p>Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p>



<b>Meningkatnya Kualitas LayananTata Kelola Perangkat Daerah</b>											<b>Alasan Pemilihan :</b> guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan Budaya Kerja untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan		
											-		
	Nilai IKM Kabupaten	82.53	82.55	83.60	83.70	84.00	84.50	85.00	85.00	<b>Makna :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	

											Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodic terhadap perkembangan unit pelayanan public		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

		Nilai SAKIP SETDA				72.4	74.4	76.4	78.2	78.2	<p><b>Makna :</b> Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi [erencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja , evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah syang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
--	--	-------------------	--	--	--	------	------	------	------	------	--	-------------------	-------------------

### 2.1.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2023

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 (tiga) Program 18 (delapan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu anggaran adalah sebesar Rp. 203.756.090.549,- (*Dua Ratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)

Penyusunan Rencana Kerja berbasis Perda Nomor 2 Tahun 2021 dimana Struktur Organisasi Sekretariat daerah mengalami perubahan yaitu dari total 9 (Sembilan) Bagian, 25 (dua puluh lima) Sub Bagian menjadi 9 (Sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian. Perubahan Struktur organisasi ini mempengaruhi jumlah sub kegiatan yang disusun dan ditetapkan. Rencana kerja Sekretariat Daerah setelah perubahan struktur organisasi pada bulan September 2021 disampaikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan laporan ini.

### 2.1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 2.2.4  
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	BB = 72,4
		Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi	100%
		Nilai Budaya Kerja Kabupaten	79,51
		Nilai IKM Kabupaten	83,70
		Nilai SAKIP SETDA	72,4

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

### 3.1 Akuntabilitas Kinerja Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

#### 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah

##### A. Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1 (T.A.1)

Capaian Tujuan Sekretariat Daerah tahun 2021-2023 berdasarkan Renstra 2021-2026

Tujuan Sekretariat Daerah	Indikator Tujuan Setda	Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Kabupaten	B = 68.4	BB = 70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2
	Capaian	n/a	BB = 66,04	BB = 66,04	Belum	belum	Belum
	Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi			100%	100%	100%	100%
	Capaian			100%	Belum	belum	Belum
Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai Budaya Kerja Kabupaten			79,51	79,51	79,51	79,51
	Capaian			79,51	Belum	belum	Belum
	Nilai IKM Kabupaten	82,55%	83.60	83,70	84,00	84,50	85,00
	Capaian	81.05%	87,82	87,82	Belum	belum	Belum
	Nilai SAKIP SETDA			72.4	74.4	76.4	78.2
	Capaian			66,04	Belum	belum	Belum

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sejak Renstra Sekretariat daerah tahun 2021-2026 ditetapkan Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan mengambil langsung dari sasaran dan indikator sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Penetapan tujuan Sekretariat Daerah juga bepedoman pada tugas dan fungsi yang

dilaksanakan Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tahun 2022 data yang dapat disampaikan dapat dilihat dari table di atas, adapun nilai-nilai tersebut diambil dari tahun sebelumnya, karena nilai belum tersedia saat laporan ini di buat.

## B. Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1 (T.B.1)  
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi  
Sekretariat Daerah tahun 2023 berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran	Efektifitas & Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Kabupaten	BB = 72.4	BB = 66,04	93,81%	BB = 78.2	84,45%	98,87%	
		Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	98,87%	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai Budaya Kerja Kabupaten	79,51	79,51	100,00%	79,51	100%	98,87%	
		Nilai IKM Kabupaten	83,60	87,82	105,05%	85	103,32%	98,87%	
		Nilai SAKIP SETDA	BB = 72.4	BB = 66,04	93,81%	BB = 78.2	84,45%	98,87%	

### 1.1 Indikator Sasaran : Nilai SAKIP

Nilai /Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 belum rilis sampai saat LKIP ini disusun dan data yang dipakai masih data tahun 2021. Sehingga data capaian masih tanda\* dan capaian akhir RPJMD 102,71. Perbaikan disetiap komponen SAKIP telah dilakukan oleh Pemda Balangan antara lain perbaikan kualitas dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD, penyesuaian SKP dan PK individu melalui aplikasi e-Kinerja, pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah Propinsi terkait hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemda Balangan untuk meningkatkan nilai

SAKIP, memperluas sampel SKPD, mengadakan pertemuan dengan SKPD untuk melakukan penyusunan cascading kinerja berdasarkan masukan teknis dari Propinsi, melakukan upgrade menu pada aplikasi e-Kino (aplikasi RB Balangan) dan e-Monev Bappedalitbang sebagai sarana monev kontrol kinerja triwulan, dan memfasilitasi SKPD melakukan penyusunan LKIP SKPD dengan Kemenpan RB pada tanggal 4 dan 5 Pebruari 2022.

### **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

Pencapaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2023 dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 298.799.389,-. (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyusunan Proses Bisnis berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026. Penyusunan proses bisnis telah dilakukan bekerjasama dengan narasumber dari Kementerian PAN RB Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Adapun Proses Bisnis mencakup beberapa peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Pada awal pebruari tahun 2022 ini juga telah dilakukan lanjuta penyusunan proses bisnis pada level SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan 77 LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 dengan narasumber luring dari Kementerian PAN RB dan nantinya akan ada regulasi dari masing-masing Kepala SKPD untuk menetapkan proses bisnis di lingkup SKPD masing-masing. Proses bisnis ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan cascading kinerja dan crosscutting kinerja organisasi.

Pemda Balangan melalui Tim Sakip juga telah memberi pemahaman kepada SKPD untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur. Pemahaman dalam bentuk asistensi penyusunan dokumen RENSTRA ke SKPD yang dileadingsectori oleh Bappeda. Dan Rapat Koordinasi TIM SAKIP beserta SKPD tekhnis penekanan terhadap tujuan SKPD, sasaran strategis SKPD dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD. Memastikan indikaktor kinerja yang disusun dapat diukur dan memiliki rumus baku yang akan ditetapkan dalam IKU.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Adapun perbaikan terhadap SAKIP ini harus juga dilakukan terhadap semua komponen SAKIP yakni : (1) Perencanaan Kinerja : Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan dalam memenuhi kriteria sebagai acuan untuk penyusunan anggaran, (2) Pengukuran Kinerja : Meningkatkan implementasi pengukuran kinerja dalam hal pemanfaatan IKU, (3) Pelaporan Kinerja : Meningkatkan

informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja supaya digunakan dalam menilai kinerja, (4) Evaluasi Internal : Meningkatkan kualitas evaluasi internal dan pemanfaatannya terkait evaluasi program dan pemantauan dan (5) Pencapaian Sasaran Kinerja : Meningkatkan capaian kinerja yang masih kurang dan mempertahankan yang telah baik. Pada akhir Januari tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan review penyusunan LKIP Kabupaten dan LKIP SKPD secara zoom dengan Kementerian PAN RB yang dihadiri langsung oleh Bapak Asisten Deputi Kinerja, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan serta Analis Kebijakan Kemenpan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan Capaian Kinerja ini tidak lepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan. Adapun sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel B.1.1 Capaian Sasaran Program**

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)	Efektivitas & Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
Sasaran Program 1 : Optimalisasi Kebijakan Bidang Pengadministrasian Umum									
1	Persentase Kebijakan di Bidang Pengadministrasian Umum yang di Implementasikan/ diterapkan Oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,00%	

Pencapaian target Program menjadi kinerja Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah dengan melaksanakan Radalok (Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan). Kegiatan ini melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan pada SKPD dibawah koordinasi masing-masing Asisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan-kebijakan sangat berpengaruh untuk proses penanggulangan terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi selama masa pelaksanaan maupun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.



## **1.2 Indikator Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten dilakukan dengan mengakumulasi nilai capaian seluruh SKPD dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dibawah lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Nilai IKM Kabupaten Balangan yang mengacu pada perumusan Permenpan tersebut kemudian di ambil nilai rata-rata dari akumulasi SKPD sampel lokus SKM. Realisasi tahun 2022 belum tercapai 100% walaupun dalam kategori capaian sangat baik, selain dipengaruhi oleh adanya peningkatan target yang ditetapkan hal ini juga dipengaruhi adanya penambahan lokus penilaian, karena pada tahun 2022 semua SKPD dan Unit Penyelenggara Pelayanan dijadikan Lokus SKM. Disamping itu juga terjadi peningkatan jumlah responden yang terlibat dalam pelaksanaan survey dari jumlah 7.800 orang pada tahun 2020 sekarang telah mencapai jumlah 10.600 orang. Lonjakan sampel ini menunjukkan kepedulian masyarakat yang semakin meningkat untuk memberikan feedback agar pelayanan publik menjadi lebih baik.

Perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten tetangga belum bisa diperoleh data karena nilai SKM dari masing-masing kabupaten belum keluar dan masih dalam proses perhitungan dan rekapitulasi data dari sampel SKM di masing-masing wilayah. Data capaian kinerja SKM antar kabupaten memiliki kecenderungan trend ketidaksampersisan, hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah lokus yang ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten dan jenis layanan yang dilakukan. Demikian juga perbandingan capaian kinerja SKM dengan Pemerintah Provinsi. Namun perbandingan capaian dengan beberapa Kabupaten/Kota dan Propinsi dapat memberikan motivasi bagi Pemda Balangan untuk memperbaiki layanan, karena jika suatu daerah SKM nya meningkat berarti sub sistem dari unsur SKM itu dapat menjadi bahan feedback peningkatan pelayanan publik eksternal bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

### **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

Pencapaian kinerja indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.312.894.143,-. (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Perbandingan capaian dengan beberapa Kabupaten/Kota dan Propinsi dapat memberikan motivasi bagi Pemda Balangan untuk memperbaiki layanan, karena jika

suatu daerah SKM nya meningkat berarti sub sistem dari unsur SKM itu dapat menjadi bahan feedback peningkatan pelayanan publik eksternal bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima, hal ini disebabkan adanya berbagai macam perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, baik tempat pelayanan, kecepatan pelayanan, maupun biaya dari pelayanan yg diberikan.

### Upaya Peningkatan nilai IKM Kabupaten Balangan

Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target terhadap beberapa SKPD dan unit penyelenggara pelayanan publik yang masih mendapatkan penilaian dibawah target akan dilaksanakan pembinaan berkelanjutan sehingga unsur-unsur penilaian yang masih rendah bisa dijadikan perhatian khusus untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Pemantauan atas rencana aksi tindak lanjut perbaikan unsur SKM yang masih rendah dilakukan secara online melalui aplikasi e-Kino menu pelayanan publik.

Keberhasilan Capaian Kinerja ini tidak lepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan. Adapun sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1 (T.B.1.4) Capaian Sasaran Program**

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Program 1 : Optimalisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
1	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Implementasikan/ diterapkan Oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,73%
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi								
2	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	94,73%

### 3.1.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Renstra 2021-2026

#### A. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah tahun 2023

Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023, Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 188.264.767.019,- atau 92,40% dari pagu sebesar Rp. 203.756.090.549,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 (A.1)  
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Per Sasaran tahun 2023

No.	Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran	Efektifitas & Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Kabupaten	BB =72.4	BB = 66,04	93,81%	BB = 78.2	84,45%	98,87%	
		Persentase SKPD dengan Capaian Nilai IKK Tinggi	100%	N/a				98,87%	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai Budaya Kerja Kabupaten	79,51	N/a				98,87%	
		Nilai IKM Kabupaten	83,60	87,82	105,05%	85	103,32%	98,87%	
		Nilai SAKIP SETDA	BB =72.4	BB = 66,04	93,81%	BB = 78.2	84,45%	98,87%	



Tabel 3.1.2 (A.2)

Efisiensi dan efektifitas Anggaran Sekretariat Daerah per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Efektif dan Efisien
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	108.423.258.099	100 %	98.661.037.087	100,00	91,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	2.657.644.700	100 %	2.466.870.000	100,00	92,82	
1,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.456.048.500	2 Dokumen	2.295.298.600	100,00	93,45	
2,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	201.596.200	6 Laporan	171.571.400	100,00	85,11	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100 %	18.225.034.926	100 %	14.931.880.725	100,00	81,93	
3,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	89 Orang	17.079.263.326	89 Orang	14.195.516.025	100,00	83,12	

LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023

	ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	/ Bulan		/ Bulan				
4,	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	574.242.000	1 Dokumen	236.732.700	100,00	41,23	
5,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	239.942.600	1 Dokumen	226.765.700	100,00	94,51	
6,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	331.587.000	12 Laporan	272.866.300	100,00	82,29	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100 %	921.725.000	100 %	901.550.000	100,00	97,81	
7,	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	921.725.000	1 Paket	901.550.000	100,00	97,81	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	35.062.961.250	100 %	32.208.625.833	100,00	91,86	
8,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.765.083.000	1 Paket	2.726.388.275	50,00	98,60	
9,	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.782.942.450	1 Paket	11.255.405.900	100,00	95,52	
10,	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.182.815.000	1 Paket	8.127.973.400	100,00	99,33	

11,	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.082.009.800	1 Paket	1.078.904.400	100,00	99,71	
12,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.566.642.000	1 Paket	1.468.204.000	100,00	93,72	
13,	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467 Laporan	9.683.469.000	467 Laporan	7.551.749.858	100,00	77,99	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	11.258.956.400	12 Bulan	10.445.723.891	100,00	92,78	
14,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.729.000.000	12 Laporan	3.166.645.961	100,00	84,92	
15,	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.537.560.400	12 Laporan	3.288.373.230	100,00	92,96	
16,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.992.396.000	12 Laporan	3.990.704.700	100,00	99,96	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	32.878.942.723	12 Bulan	30.597.740.336	100,00	93,06	
17,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	18.912.843.950	50 Unit	17.500.073.004	100,00	92,53	
18,	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	805.509.000	20 Unit	770.795.000	100,00	95,69	
19,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7.944.367.273	3 Unit	7.677.139.832	100,00	96,64	

20,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.292.275.000	3 Unit	2.107.190.000	100,00	91,93	
21,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.923.947.500	3 Unit	2.542.542.500	100,00	86,96	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100 %	2.385.197.800	100 %	2.207.784.807	100,00	92,56	
22,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	261.157.800	1 Orang / Bulan	83.784.807	50,00	32,08	
23,	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.724.040.000	1 Paket	1.724.000.000	100,00	100,00	
24,	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	400.000.000	2 Orang / Bulan	400.000.000	100,00	100,00	
	Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	33.33 %	3.007.121.000	37,5 %	2.973.020.905	112,51	98,87	
		Nilai laporan kinerja Pemda	14.26 Nilai		14,26 Nilai		100,00		
		Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	63.33 %		76 %		120,01		
		Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100 %		100 %		100,00		



		Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100 %		100 %		100,00		
		Nilai IPP SKPD Sampel	100 Nilai		100 Nilai		100,00		
		Nilai Komposit Kelembagaan	78.4 Nilai		78,4 Nilai		100,00		
		Nilai IKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan non UPP yang bernilai Baik	84 Nilai		84 Nilai		100,00		
25,	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 Dokumen	592.333.000	65 Dokumen	577.636.414	100,00	97,52	
26,	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	486.223.000	4 Laporan	477.984.528	100,00	98,31	
27,	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	1.928.565.000	4 Dokumen	1.917.399.963	100,00	99,42	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana	100 %	2.025.674.300	100 %	1.927.840.590	100,00	95,17	
28,	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	670.786.500	1 Laporan	646.718.570	100,00	96,41	
29,	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	683.716.000	1 Laporan	640.444.902	100,00	93,67	
30,	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	671.171.800	5 Laporan	640.677.118	100,00	95,46	
2,	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan	100 %	91.135.547.100	75 %	86.330.173.497	75,00	94,73	

		oleh SKPD (%)							
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100 %		75 %		75,00		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD	100 %	1.622.780.300	100 %	1.554.465.925	100,00	95,79	
31,	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	797.109.600	4 Dokumen	760.669.059	100,00	95,43	
32,	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	455.851.700	2 Dokumen	445.142.129	100,00	97,65	
33,	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	369.819.000	3 Dokumen	348.654.737	100,00	94,28	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana	100 %	87.986.094.800	100 %	83.430.656.675	100,00	94,82	
34,	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	13.749.878.200	5 Dokumen	13.436.374.244	100,00	97,72	
35,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	3 Dokumen	67.874.205.600	3 Dokumen	64.876.373.777	100,00	95,58	

		Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
36,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	6.362.011.000	2 Dokumen	5.117.908.654	100,00	80,44	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	100 %	1.149.842.000	100 %	1.010.816.697	100,00	87,91	
37,	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	603.479.000	500 Dokumen	597.047.730	100,00	98,93	
38,	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	364.601.000	10 Kasus	236.761.762	100,00	64,94	
39,	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	181.762.000	500 Dokumen	177.007.205	100,00	97,38	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	376.830.000	10 Dokumen	334.234.200	100,00	88,70	
40,	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	376.830.000	10 Dokumen	334.234.200	100,00	88,70	

3,	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100 %	4.197.285.350	75 %	3.273.556.435	75,00	77,99	
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100 %		75 %		75,00		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	100 %	1.373.991.500	100 %	958.994.479	100,00	69,80	
41,	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	226.820.000	4 Dokumen	150.891.002	100,00	66,52	
42,	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	536.541.500	4 Laporan	462.161.919	100,00	86,14	
43,	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	459.300.000	1 Dokumen	252.820.491	100,00	55,04	
44,	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	151.330.000	1 Dokumen	93.121.067	100,00	61,54	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	1.040.072.000	100 %	689.911.062	100,00	66,33	

45,	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	493.999.000	4 Dokumen	311.388.291	100,00	63,03	
46,	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	209.240.000	1 Laporan	131.006.891	100,00	62,61	
47,	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	336.833.000	4 Laporan	247.515.880	100,00	73,48	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	50 Nilai	1.567.661.650	50 Nilai	1.431.880.088	100,00	91,34	
48,	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	399.249.000	1 Dokumen	379.330.921	100,00	95,01	
49,	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	340.918.750	1 Dokumen	313.879.975	100,00	92,07	
50,	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	827.493.900	6 Orang	738.669.192	100,00	89,27	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	100 %	215.560.200	100 %	192.770.806	100,00	89,43	
51,	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	58.199.000	1 Dokumen	47.311.332	100,00	81,29	

52,	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	95.632.000	1 Dokumen	91.445.574	100,00	95,62	
53,	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	61.729.200	1 Dokumen	54.013.900	100,00	87,50	

### 3.1.3 Analisis Kinerja lainnya Sekretariat Daerah

#### A. Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Sekretariat Daerah tahun 2021

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Setiap tujuan memiliki Indikatornya sendiri yang mana semua indikator tersebut hanya bisa dicapai melalui pelaksanaan program pada SKPD diseluruh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Indonesia. Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian tujuan ke 16 yaitu **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**. Dengan indikatornya adalah Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya akan berperan melalui pelaksanaan Program berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerinathan Daerah, Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Adapun rincian target program dan capaiannya pada tahun 2021 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3. (A)

MATRIK BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA  
CAPAIAN SDG's SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi semester		Realisasi Anggaran	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
		2021	2021		2021				
			I	II					
<b>TUJUAN 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan)</b>									
<b>INDIKATOR SDGS : 16.6.1.(b)):Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).</b>									
<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
<b>INDIKATOR PROGRAM : PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI</b>									
<b>KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI</b>									
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen LKJ Kabupaten	Dokumen	1	1	0	259,271,288.00	2,002,867,690	APBD Kab.Balangan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan
	Jumlah SKPD yang menyampaikan lapornya kinerja tepat waktu	SKPD	41	41	0				
<b>PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>									



INDIKATOR PROGRAM : PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI									
KEGIATAN : ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN									
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan	4	4	0	200,112,000.00	1,087,503,795	APBD Kab.Balangan	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Balangan
	Laporan Penerapan SPM Pelayanan Dasar	Laporan	1	0	1				
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
INDIKATOR SDGS : 16.6.1.(d):Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
INDIKATOR PROGRAM : PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI									
KEGIATAN : PENATAAN ORGANISASI									
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil monitoring PMPRB	Laporan	1	1	0	259,271,288.00	2,002,867,690	APBD Kab.Balangan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan

## B. Penghargaan-penghargaan yang didapat Sekretariat Daerah

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Tema Penghargaan	Tahun
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Prestasi dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2019 dengan Predikat Nilai BB	2020

## C. Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah

### 1. Rencana Aksi Sekretariat daerah Tahun 2021

Menindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Balangan berdasarkan hasil LHE terhadap SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 maka disusunlah Rencana Aksi pelaksanaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada masing-masing Bagian pada tahun 2022, kemusian dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana aksi tersebut secara terus-menerus yaitu minimal 4 kali dalam setahun. Rincian rencana aksi disampaikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.

### 2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas tahun 2022

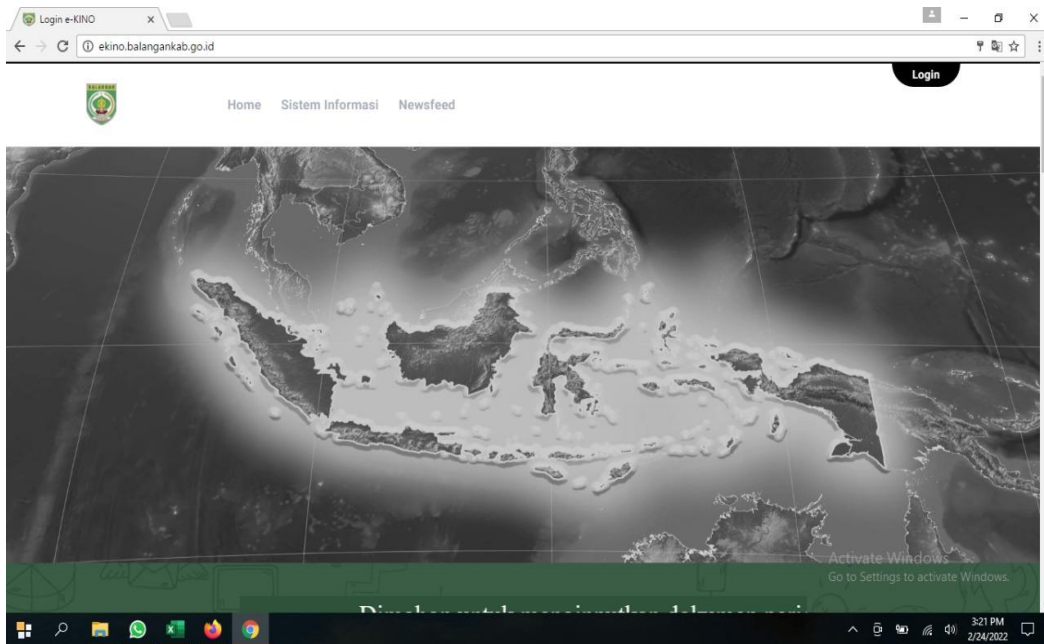
2022 Pada tahun 2022 terdapat Program kegiatan prioritas yang ditetapkan untuk membantu dalam pencapaian target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	IKU	Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Asisten Administrasi umum
			Kegiatan : Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	JF Analis Kebijakan (Subkooor Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)
		Indeks Pelayanan Publik		
		Nilai SAKIP	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	JF Analis Kebijakan (Subkooor Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi)
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
Nilai EKPPD	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	JF Analis Kebijakan (Subkooor Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah)		

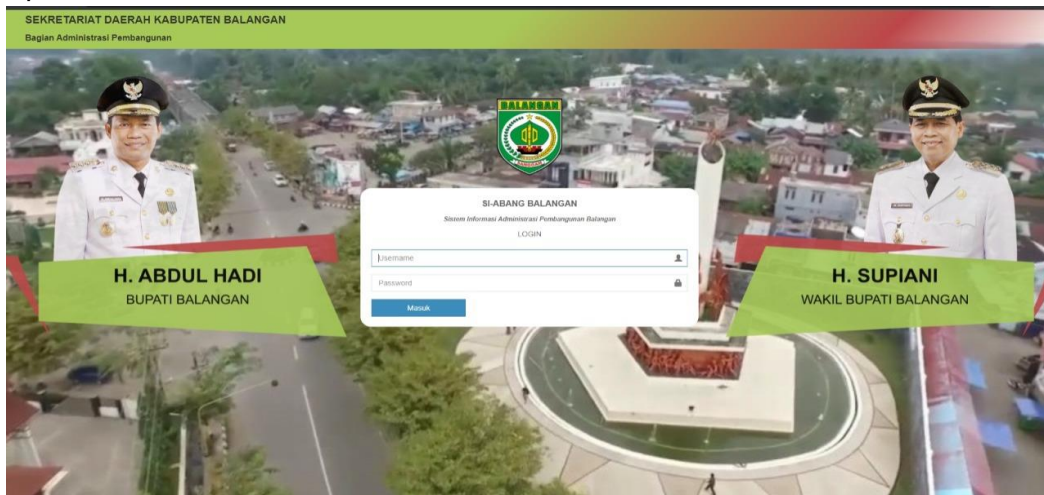
### 3. Inovasi Sekretariat Daerah Tahun 2022

Pada tahun 2022 dilakukan beberapa inovasi untuk mempermudah pelaksanaan rencana aksi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya di Sekretariat Daerah namun digunakan pula oleh seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Adapaun Inovasi tersebut berupa pembuatan Aplikasi sebagai berikut :

#### 1. Aplikasi EKINO



#### 2. Aplikasi SI-ABANG





## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Balangan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Capaian indikator tujuan SKPD Berdasarkan Renstra 2021-2026**

Pada Renstra baru terdapat 1 tujuan dengan 4 indikator. Dari 4 indikator tersebut 3 indikator tidak dapat disampaikan data capaiannya karena data belum tersedia. Adapaun indikator tersebut adalah Nilai SAKIP, Nilai EKPPD dan Nilai Indkes Pelayanan Publik (IPP). Nilai SAKIP dan nilai IPP belum dikeluarkan pihak Kementerian PAN RB sedangkan nilai EKPPD belum dikeluarkan oleh Tim Nasional penilaian EKPPD. Sedangkan nilai IKM capaian berhasil dengan pencapaian sebesar 105,05%. Pencapaian nilai IKM jika dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Renstra yaitu tahun 2026 adalah sebesar 95,35%.

#### **2. Upaya perbaikan berdasarkan hasil Rekomendasi Inspektorat hasil LHE terhadap Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

- a. Pada Renstra tahun 2021-2026 telah disampaikan Tujuan dan Indikator Tujuan;
- b. Dilaksanakan Monev Rencana Aksi secara berkala dan seluruh aksinya didokumentasikan dengan rapi;
- c. Beberapa inovasi kerja untuk mendukung pencapaian kinerja seperti digunakannya aplikasi EKINO dan SIABANG Balangan
- d. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;
- e. Mengurangi program dan kegiatan yang tidak jelas hasil/keluarannya;
- f. Meningkatkan disiplin kerja;

- g. Meningkatkan pengetahuan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. Membangun komitmen kerjasama yang baik dan berdaya guna antara Pimpinan dan Pelaksana program kegiatan melalui rapat kerja guna meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Paringin, Februari 2023,

Sekretaris Daerah,



**H. SUTIKNO, AP., M.AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760417 199412 1 001